

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan empat indikator utama dari teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh berdasarkan setiap indikator:

1. Komunikasi

Penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa komunikasi antara pihak terkait, termasuk masyarakat dan DLH, telah dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 1 Tahun 2020. Namun, komunikasi terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengangkutan sampah dan pengajuan kerja sama masih perlu perbaikan agar lebih jelas dan konsisten, sehingga mempermudah seluruh pihak yang terlibat.

2. Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal anggaran dan fasilitas pendukung, menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Minimnya anggaran menyebabkan tidak meratanya pelayanan pengangkutan sampah serta kapasitas tanggul penampungan di TPA yang cepat penuh. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi sumber daya untuk mendukung kebijakan agar lebih efektif.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Pelaksana di DLH Kabupaten Mojokerto tetap mengacu pada regulasi yang jelas dan berusaha mencapai tujuan kebijakan. Sikap ini tercermin dalam upaya mereka menjaga keberlanjutan pelayanan pengangkutan sampah dan pengelolaan akhir sampah di TPA Karangdiyeng.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada telah dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. DLH Mojokerto, khususnya melalui Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, menjalankan mekanisme kerja yang sesuai dengan peraturan. Namun, adanya birokrasi yang belum sepenuhnya optimal dalam pemberian pelayanan dan pengelolaan fasilitas menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto sudah berjalan dengan baik dan cukup optimal meskipun perlu perbaikan. Kendala utama berupa keterbatasan sumber daya dan tantangan dalam komunikasi serta birokrasi perlu segera diatasi untuk memastikan pelayanan yang merata dan efisien. Dengan adanya perbaikan dalam keempat indikator ini, kebijakan pengelolaan sampah dapat diimplementasikan secara lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, berikut adalah saran yang dapat diberikan:

1. DLH perlu memperbaiki mekanisme komunikasi, baik internal antarbagian di dinas maupun eksternal dengan masyarakat dan pihak-pihak yang mengajukan kerjasama pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun dan menyosialisasikan kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah yang lebih jelas, terutama terkait pengajuan MoU pengangkutan sampah dan pengelolaan di TPA. Kemudian, Untuk mengatasi cepat penuhnya tanggul penampungan di TPA Karangdiyeng, DLH perlu mengupayakan pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern, seperti daur ulang, pengolahan organik, atau *waste-to-energy*.
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas fokus studi dengan mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto. Selain pendekatan kualitatif yang telah diaplikasikan dalam penelitian ini, penelitian mendatang dapat menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur efektivitas pengelolaan sampah berdasarkan indikator kinerja seperti jumlah sampah terangkut, efisiensi biaya, dan tingkat kepuasan masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Mojokerto disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran terkait pengelolaan sampah daerah, termasuk untuk pengembangan fasilitas dan sumber daya manusia. Kebijakan pendukung yang memberikan

insentif bagi masyarakat atau pelaku usaha yang terlibat dalam pengelolaan sampah juga dapat dipertimbangkan. Kebijakan pengelolaan sampah perlu diarahkan pada penerapan prinsip ekonomi sirkular, yang menekankan pada pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.